

PROSIDING

LOKAKARYA PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN PERENCANAAN STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN JAWA TIMUR

aan
Timur



DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KARANGPLOSO
2000

PROSIDING

Lokakarya Penyusunan Prioritas Program Dan Perencanaan Strategis Pembangunan Pertanian Jawa Timur

Penyunting:

Ir. Arry Supriyanto, MS.

Ir. M. Cholil Mahfud, MS.

Penyunting Pelaksana:

Drs. Martinus Sugiyarto, MP

Dra. Endang Widajati

Budi Santosa

Suwandoyo



DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KARANGPLOSO
2000

[Handwritten signature]
6/11/2000

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Sambutan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Jawa Timur	iii
Rumusan Lokakarya	vii
Daftar Isi	x
Laporan Ketua Panitia Penyelenggara	xii
Arah, Strategi dan Model Pembangunan Pertanian Jawa Timur di Masa Depan <i>Kabul Santoso, Soetrisno dan Jani Januar</i>	1
Optimasi Pemberdayaan Sumberdaya Alam Pertanian dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Jawa Timur <i>Bappeda Jawa Timur</i>	18
Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Dalam Rangka Otonomi Daerah <i>Effendi Pasandaran</i>	27
Arah dan Kebijaksanaan Balitbangda Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian di Jawa Timur <i>Balitbangda Jatim</i>	52
Strategi Perakitan dan Pengembangan Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi di Jawa Timur <i>Suyamto H</i>	62
Optimasi Potensi Lestari Sumberdaya dalam Mendukung Pembangunan Perikanan di Jawa Timur <i>Wiadnya, D.G.R; Sutjipto, D.D.; Murachman, Purwodajjanto</i>	76
Reorientasi Program dan Kebijaksanaan Pembangunan Perikanan Mendukung Otonomi Daerah di Jawa Timur <i>Dinas Perikanan Jawa Timur</i>	102
Reorientasi Program dan Kebijaksanaan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Mendukung Otonomi Daerah di Jawa Timur <i>Diperta Tingkat I Propinsi Jawa Timur</i>	110

Reorientasi Program dan Kebijakan Pembangunan Peternakan Mendukung Otonomi Daerah di Jawa Timur <i>Padang Bambang Wirjono, Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur</i>	123
Pengembangan Sistem Kediriian Ekonomi Pedesaan <i>Hidayat Nataatmadja</i>	135
Peran LSM Dalam Mendukung Akslerasi Pembangunan Pertanian di Jawa Tumur <i>Hesti R. Wijaya</i>	139
DAFTAR PESERTA	155

LAPORAN KETUA PANITIA PENYELENGGARA

Yang terhormat, Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur,
Yang terhormat, Bapak Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I Jawa Timur
Yang terhormat, Ibu Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur
Bapak, Ibu dan hadirin peserta lokakarya yang kami hormati.

***Assalammualaikum warohmatullahi wabarokatuh,
selamat beraba hagia bagi yang beragama selain Islam.***

Pertama-tama marilah kita secara bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya dengan nikmat dan ridloNYA semata pada siang hari ini kita diberi kesempatan berkumpul untuk melaksanakan serangkaian acara Lokakarya Penyusunan Prioritas Program dan Perencanaan Strategis Pembangunan Pertanian Jawa Timur. Selanjutnya perkenankanlah kami atas nama panitia pelaksana mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta.

Bapak Gubernur, Bapak Kepala Diperta, Ibu Kepala Kanwil, dan hadirin yang kami hormati.

Pada kesempatan yang baik ini perlu kami laporkan bahwa lokakarya ini diselenggarakan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso, Malang selama 2 (dua) hari, pada tanggal 7 sampai dengan 8 bulan Maret tahun 2000, di Hotel Cendana Jalan Kombes. M. Durijat nomor 6 Surabaya. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk menyusun prioritas program dan perencanaan strategis pembangunan pertanian menyongsong otonomi daerah Propinsi Jawa Timur, yang akan membahas 11 (sebelas) judul makalah terdiri atas:

1. Arah, Strategi dan Model Pembangunan Pertanian Jawa Timur di Masa Depan
2. Optimasi Pemberdayaan Sumberdaya Alam Pertanian Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Jawa Timur
3. Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Dalam Rangka Otonomi Daerah
4. Arah dan Kebijaksanaan Balitbangda dalam Mendukung Pembangunan Pertanian Di Jawa Timur

5. Strategi Perakitan dan Pengembangan Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi di Jawa Timur
6. Optimasi Potensi Lestari Sumberdaya Alam Perikanan Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Jawa Timur
7. Reorientasi Program dan Kebijakan Pembangunan Perikanan Mendukung Otonomi Daerah Jawa Timur
8. Reorientasi Program dan Kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Mendukung Otonomi Daerah Jawa Timur
9. Reorientasi Program dan Kebijakan Pembangunan Peternakan Mendukung Otonomi Daerah Jawa Timur I
10. Pengembangan Sistem Kedirian Ekonomi Pedesaan
11. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mendukung Akselerasi Pembangunan Pertanian di Jawa Timur

Bapak, ibu serta hadirin yang kami hormati

Lokakarya kali ini diikuti oleh 66 peserta yang berasal dari :

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
2. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi,
3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur,
4. Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur,
5. Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur,
6. Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur,
7. Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian,
8. Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat,
9. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao,
10. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia,
11. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso,
12. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Jawa Timur,
13. Beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Jawa Timur
14. Lembaga Swadaya Masyarakat,
15. Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Propinsi Jawa Timur dan
16. Kontak Tani Nasional Andalan (KTNA)

Dengan segala kerendahan hati kami segenap panitia pelaksana mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya atas peran serta bapak, ibu dalam lokakarya ini, sekaligus kami mohon maaf apabila selama pelaksanaannya terdapat banyak kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu terlaksananya lokakarya ini.

Kami berharap mudah-mudahan hasil dari lokakarya ini dapat memberi sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengambil kebijaksanaan dalam rangka menyusun prioritas program dan perencanaan strategi pembangunan pertanian untuk memadukan langkah guna menyongsong otonomi daerah Propinsi Jawa Timur .

Akhirnya kami mohon kepada Bapak Imam Utomo, selaku Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur memberikan pengarahan sekaligus membuka lokakarya ini secara resmi.

***Sekian terima kasih
Wassalammualaikum warohmatullahi
wabarokatuh.***

Maret, 2000

Panitia Pelaksana

ARAH, STRATEGI DAN MODEL PEMBANGUNAN PERTANIAN JAWA TIMUR DI MASA DEPAN

Kabul Santoso, Soetrisno, dan Jani Januar

PENDAHULUAN

Visi pembangunan pertanian nasional masa depan adalah membangun pertanian modern, tangguh dan efisien menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Makna yang dapat ditangkap dari visi tersebut adalah bahwa pembangunan pertanian mendatang pada hakekatnya merupakan kelanjutan, pendalaman dan peningkatan daripada pembangunan pertanian kita saat ini sebagai upaya mewujudkan pertanian yang tangguh, maju, dan efisien yang dicirikan oleh kemampuannya dalam mensejahterakan para petani, pekebun, peternak dan nelayan. Untuk itulah, misi pembangunan pertanian dirumuskan sebagai: usaha menggerakkan berbagai upaya untuk memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal dan menerapkan teknologi tepat serta spesifik lokasi dalam rangka membangun pertanian yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, selain itu memberdayakan masyarakat pertanian menuju wiraswasta agribisnis yang mandiri, maju dan sejahtera (Departemen Pertanian, 2000).

Apabila dilihat pembangunan pertanian di Jawa Timur, yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, diarahkan untuk (a) meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan, serta (b) terwujudnya pertanian yang maju, efisien, dan tangguh, yang mampu meningkatkan hasil dan mutu produksi serta tingkat pengolahan produksi. Keinginan untuk mewujudkan pertanian yang maju, efisien, dan tangguh ini sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Timur tetap berorientasi pada keuntungan petani, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, serta mengisi dan memperluas pasar.

Selama PJP I dan Pelita VI ini peranan pembangunan pertanian terhadap kemajuan ekonomi Jawa Timur sangat besar, terutama jika dilihat dari (a) meningkatnya produksi pangan, dan (b) tingkat kesejahteraan petani. Rata-rata

pertumbuhan produksi tanaman pangan mengalami kenaikan 7,72% per tahun walaupun pada akhir-akhir ini mengalami penurunan, tanaman buah-buahan menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar, yaitu 34,56%. Penyerapan tenaga kerja di sub-sektor tanaman pangan rata-rata mengalami peningkatan sebesar 2,72% per tahun.

Untuk sub-sektor perkebunan, kenaikan pesat produksi ditunjukkan oleh semua komoditas, yaitu coklat 18,45%, tembakau 41,81%, cengkeh 121,28% dan kelapa 43,01%, dengan rata-rata pertumbuhan produksi mencapai 56,14%. Sub-sektor peternakan selama PJP I juga mengalami peningkatan produksi ternak, seperti daging 3,74%, telur 9,84% dan susu 8,83%. Tingkat penyerapan tenaga kerja sub-sektor ini rata-rata meningkat 18,61% per tahun. Sedangkan untuk sub-sektor perikanan meningkat rata-rata 16,81% per tahun (perikanan darat 24,55% dan perikanan laut 9,06%).

Berdasarkan data-data di atas pembangunan pertanian di Jawa Timur sebaiknya diarahkan pada pendekatan ketahanan pangan dan agribisnis, misi ini sangat tepat dikaitkan dengan tantangan globalisasi. Kenyataan dunia tanpa batas (*borderless world*) membawa implikasi terbukanya sektor pertanian terhadap segala bentuk teknologi dan investasi sekaligus ancaman industrialisasi. Konsekuensinya, sektor pertanian tidak bisa lagi dipahami dalam kerangka dikotomi dengan industri. Pembangunan pertanian harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas dan harus dilakukan penyempurnaan manajemen operasional untuk mencapai tujuan-tujuan program pembangunan pertanian yang lebih efisien dan optimal. Pembangunan pertanian masa kini dan masa mendatang seyogyanya terdiri dari berbagai kebijaksanaan yang spesifik dan namun terkait antara satu dengan yang lainnya (*intergated*).

Menurut Santoso dan Soetriono, 1998, dalam menghadapi kenyataan seperti itu maka perlu perubahan cara pandang (*paradigm shift*) terhadap pertanian. Cara pandang yang baru tersebut lebih berorientasi pada agribisnis, yang melihat pertanian sebagai lapangan usaha dan lapangan kerja yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan pasar dengan tujuan memperoleh nilai tambah yang maksimal secara kompetitif. Dengan demikian

setiap usahatani dalam kerangka agribisnis harus dirancang dan dilakukan secara rasional dengan orientasi pada kebutuhan pasar (*market driven agriculture*).

TANTANGAN DAN PELUANG

Perekonomian Indonesia tidak terlepas dari gejolak lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis. Adanya Putaran Urugay yang lebih meliberalisasikan perdagangan internasional dan pembentukan kawasan perdagangan bebas termasuk AFTA, NAFTA, APEC akan melibatkan ekonomi Indonesia pada perdagangan yang lebih kompetitif pada masa 20 tahun mendatang dan kemungkinan mengubah peta keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas pertanian Indonesia. Munculnya kawasan Asia-Pasifik sebagai kekuatan ekonomi baru merupakan potensi pasar bagi produk-produk pertanian Indonesia di masa datang. Secara geografis, Indonesia berada pada posisi strategis yang menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara pemasok lainnya untuk kawasan ini.

Munculnya liberalisme perdagangan memberikan peluang dan tantangan baru bagi pembangunan pertanian secara menyeluruh. Diturunkannya tarif perdagangan ke batas terendah berakibat pasar produk pertanian di setiap negara semakin terbuka untuk semua negara, sehingga persaingan antar produsen di bidang pertanian semakin ketat. Apabila pertanian Indonesia mampu bersaing, maka pangsa pasar internasional akan meningkat. Sebaliknya jika pertanian Indonesia tidak mampu bersaing, maka yang hilang tidak hanya pangsa pasar internasional, tetapi juga pangsa pasar domestik. Dengan demikian salah satu tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah meningkatkan daya saing produk agribisnis, dalam arti dapat mempertahankan daya saing komoditas yang masih rendah.

Keberadaan keunggulan bersaing menunjukkan bahwa kemampuan memasok barang dan jasa yang sesuai dengan preferensi konsumen merupakan keharusan (*necessary condition*) bagi kemampuan bersaing. Atau kemampuan menghasilkan barang dan jasa semurah mungkin belum menjamin keunggulan bersaing. Harga penjualan barang dan jasa yang lebih rendah akan memiliki

keunggulan bersaing jika atribut barang tersebut telah sesuai dengan preferensi konsumen. Rumusan keunggulan bersaing ini mengharuskan kita mengetahui perkembangan preferensi konsumen secara rinci. Pengetahuan ini penting sebagai bahan merumuskan strategi pengembangan pembangunan pertanian untuk meningkatkan kemampuan bersaing Indonesia.

Ditinjau dari peluang yang ada di masa datang, pengembangan agribisnis tidak hanya memiliki ruang gerak yang cukup luas untuk menjadi salah satu *newly agro-industrialized country (NAIC)*, tetapi kuat dan kokoh di bidang agribisnis dan agroindustri. Hal ini didukung oleh tersedianya pasar yang potensial, baik domestik maupun internasional, serta ketersediaan sumber daya alam yang sangat besar. Pengalaman dalam membangun pertanian selama PJP I sehingga mampu mencapai swasembada beras dan melestarikannya juga merupakan modal dasar yang sangat penting untuk membangun agribisnis selanjutnya.

Dalam era perdagangan bebas yang sangat kompetitif, sub-sektor tanaman pangan akan dihadapkan pada tuntutan masyarakat untuk menghasilkan produk dengan harga dan mutu yang harus dapat bersaing dengan produk luar. Dalam era ini penguasaan teknologi pertanian menjadi sangat penting artinya sehingga peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian guna menguasai teknologi mutlak diperlukan.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan adanya UU No.12 tahun 1992, yang antara lain isinya menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk memilih komoditas pertanian yang diusahakan, merupakan fenomena yang perlu mendapat perhatian. Kondisi ini menyebabkan semakin tidak mudahnya menetapkan areal apabila komoditas yang ditargetkan tidak memberikan pendapatan yang cukup kompetitif bagi petani.

Tuntutan efisiensi dan efektivitas di kalangan petani akan semakin meningkat sehingga teknologi yang tidak efisien dan efektif tidak akan mendapat respon dari petani. Swastanisasi pada berbagai usaha ekonomi, termasuk di sub-sektor pertanian yang semakin meningkat, memberikan peluang bagi pelaksanaan program pembangunan untuk bekerjasama tidak hanya dengan Koperasi dan BUMN tetapi juga dengan pihak swasta.

Penghapusan subsidi dan proteksi di sub-sektor komoditas tertentu, yang secara berangsur-angsur telah dilaksanakan, merupakan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian karena dapat berpengaruh terhadap pencapaian produksi. Demikian pula perubahan struktur ekonomi nasional dari ekonomi agraris ke ekonomi industri dapat berpengaruh terhadap konsentrasi petani terhadap usahataniya oleh karena kesempatan kerja non pertanian akan lebih menarik.

Dari visi pembangunan pertanian di atas, maka tantangan dan peluang pembangunan di Jawa Timur adalah :

Tantangan

Secara umum, tantangan yang sedang dan akan dihadapi dalam rangka pengembangan pembangunan pertanian di Jawa Timur adalah:

- a) Usaha untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 4,89%;
- b) Memperbaiki distribusi pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan;
- c) Meningkatkan daya saing produk unggulan baik di pasar domestik maupun pasar ekspor;
- d) Menekan kegiatan yang menghambat efisiensi produksi;
- e) Mempersiapkan SDM dan sarana penunjangnya.

Sedangkan secara khusus, tantangan dalam pembangunan pertanian di Jawa Timur adalah kecenderungan adanya tekanan dari negara-negara tujuan ekspor yang mengkaitkan dengan masalah-masalah HAM, demokrasi, lingkungan hidup, subsidi dan masalah proteksi atau *dum-ping*.

Peluang

Secara rinci peluang yang diperoleh Jawa Timur sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis adalah :

- a) Potensi bahan baku serta daya dukung sumberdaya alam dan manusia cukup untuk menjamin kelangsungan kegiatan pembangunan pertanian yang berorientasi pada agribisnis;

- b) Potensi permintaan produk-produk unggulan semakin besar sejalan dengan pertumbuhan ekonomi;
- c) Perubahan lingkungan demografis (jumlah penduduk), psikografis (selera, gaya hidup), industrialisasi, perkembangan perkotaan, dan peningkatan pendapatan potensi permintaan (*demand*);
- d) Peningkatan kemampuan ekonomi daerah sebagai akibat dari perubahan dan kemajuan dalam transformasi struktural masyarakat agraris menjadi masyarakat industri;
- e) Investasi domestik dan asing membuka jalan bagi alih teknologi seiring dengan program teknologi masuk desa;
- f) Terbukanya pasar-pasar domestik negara lain akibat adanya kesepakatan AFTA, APEC dan WTO.

ARAH DARI VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PERTANIAN

Untuk mewujudkan visi pembangunan pertanian di atas, misi pembangunan pertanian adalah memberdayakan petani, peternak dan nelayan menuju suatu masyarakat tani mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Sejalan dengan kondisi tersebut diharapkan dalam operasionalisasinya antara lain:

1. Menciptakan peluang ekonomi bagi pengembangan agribisnis dan ekonomi pedesaan dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani dan penduduk pedesaan.
2. Mengamankan ketersediaan pangan dan hasil-hasil pertanian secara berkelanjutan dalam upaya memantapkan ketahanan pangan
3. Membina dan memberdayakan manusia pertanian agar mampu berperan dalam era global
4. Melestarikan sumberdaya alam dan kekayaan alam untuk menjamin keberhasilan pembangunan
5. Menyelaraskan saling ketergantungan kegiatan pertanian antar wilayah dan antar sektor menuju terciptanya struktur ekonomi yang handal
6. Mengembangkan teknologi pertanian strategis, spesifik lokasi dan ramah lingkungan

Keadaan pertanian seperti di atas dapat dicapai melalui program-program pembangunan pertanian dengan strategi :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya domestik, yang merupakan modal dasar pembangunan yang sangat berharga dan mempunyai potensi yang sangat besar.
2. Perluasan orientasi pembangunan pertanian melalui diversifikasi teknologi, sumberdaya, produksi dan konsumsi yang memperhatikan aspek sosial budaya di setiap wilayah sehingga dicapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan harmonis.
3. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi dan tepat guna. Teknologinya yang diterapkan tidak harus dari instansi namun dari lembaga yang telah direkomendasi oleh instansi yang berwenang.
4. Meningkatkan efisiensi sistem agribisnis untuk meningkatkan produksi pertanian dengan kandungan IPTEK dan berdaya saing tinggi, sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan bagi petani sebagai produsen dan masyarakat konsumen secara berimbang.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan pembangunan pertanian pada era yang akan datang terfokus pada upaya :

1. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak dan nelayan
2. Meningkatkan ketahanan pangan
3. Menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi untuk mengisi pasar domestik dan ekspor
4. Menyediakan lapangan kerja dengan produktivitas tinggi dan kesempatan berusaha yang efisien di bidang agribisnis
5. Meningkatkan kemandirian petani-nelayan dan pemberdayaan kelembagaan serta prasarana pertanian.

Adapun fokus kebijakan pembangunan pertanian sesuai dengan rumusan GBHN 1999-2003 di dalam kabinet persatuan nasional adalah :

1. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada kemampuan produksi, keragaman sumberdaya bahan pangan, serta kelembagaan dan budaya lokal
2. Mengembangkan agribisnis yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah berdasarkan kompetisi dan keunggulan komparatif sumberdaya alam dan sumberdaya manusia daerah.

Sebagai salah satu kebijakan pertanian yang mendapat perhatian utama pada saat ini ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang paling strategis dalam konteks pembangunan suatu negara. Sasaran utama ketahanan pangan adalah terjaminnya akses pangan bagi semua penduduk suatu negara dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk eksistensi hidup, sehat, produktif. Akses terhadap pangan yang cukup merupakan hak asasi manusia yang harus selalu dijamin oleh negara bersama masyarakat. Hal ini sudah diakui di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Ketahanan Pangan No. 7 tahun 1996. Oleh karena itu setiap negara senantiasa berusaha membangun sistem ketahanan pangan yang mantap. Dengan demikian adalah sangat rasional dan wajar jika Indonesia menjadikan ketahanan pangan nasional sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Adapun yang menjadi sasaran peningkatan ketahanan pangan adalah: (1) Meningkatkan produksi beras secara berkelanjutan untuk memantapkan ketahanan pangan nasional. (2) Meningkatkan produksi pangan sumber karbohidrat alternatif nan beras yang berakar pada sumberdaya dan budaya lokal, (3) Meningkatkan produksi pangan sumber protein, untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, dan (4) meningkatkan keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan dan menurunkan konsumsi beras per kapita.

PERMASALAHAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN PANGAN VERSA OTONOMI DAERAH

Dalam rangka proses pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini, salah satu hal yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah sektor pertanian masih menjadi prioritas nasional ? Jika masih, maka tentu saja perlu adanya suatu kebijakan nasional dalam bidang pertanian. Salah satu hal pokok yang menyangkut dalam Otonomi daerah adalah transformasi kelembagaan sektor pertanian. Dengan diberikannya Otonomi daerah dan kontrol Anggaran yang penuh bagi daerah mungkin perlu dibangun suatu kelembagaan yang berbeda pada saat ini. Dalam rangka memperkuat sumberdaya manusia yang ada di daerah, perlu adanya pemindahan pegawai pusat ke daerah guna membantu memformulasikan program-program pembangunan pertanian. Sebagai misal, Kanwil Deptan yang pada saat ini

sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, pada saat ini tidak lagi diperlukan dan pegawainya dapat dilimpahkan ke lembaga baru yang ada di daerah tingkat II atau Kabupaten/Kotamadya.

Jika suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah mengacu pada keunggulan komparatif dari komoditas yang dimilikinya, maka suatu hal penting yang memerlukan perhatian adalah masalah produksi pangan. Sekiranya tidak ada kebijakan nasional yang memayunginya, maka masing-masing daerah akan menanam komoditi unggulannya dan hal ini akan sangat berbahaya dimana ketahanan pangan akan terabaikan.

Otonomi daerah sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional maupun daerah. Pengalaman percontohan otonomi daerah di masa lalu memperlihatkan bahwa pengembangan pertanian tidak mencapai sasarnya. Untuk itu pemerintah dapat belajar dari kesalahan yang lalu untuk memperbaiki cara-cara pembangunan pertanian di masa yang akan datang. Pengembangan penelitian yang duplikasi di tingkat pusat daerah tidak akan membuahkan hasil dalam pelaksanaan otonomi daerah. Demikian halnya dengan penyuluhan pertanian yang tidak profesional. Untuk itu para penyuluh harus ditingkatkan kualitasnya sehingga mereka dapat bekerja secara profesional.

ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI TINGKAT WILAYAH

Prinsip penyediaan pangan di tingkat wilayah tidak terlepas dari kebijakan pangan di tingkat nasional yang berpijak pada beberapa kerangka tujuan, yaitu terjaminnya ketahanan pangan nasional dengan memperhatikan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk meningkatkan efisiensi. Dengan berpijak pada tujuan tersebut, maka dalam rangka peningkatan pendapatan petani, petani juga diberi kebebasan untuk memilih komoditas yang ingin diusahakannya. Semua ini dapat dicapai bila terdapat optimalisasi pemanfaatan aset nasional di bidang pembangunan pangan seperti teknologi, tenaga ahli dan lain sebagainya. Prinsip ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan petani dengan menerapkan kebijaksanaan harga dengan konsisten.

Ketersediaan pangan di tingkat wilayah terkait erat dengan ketahanan pangan wilayah, yang juga untuk menyediakan kebutuhan pokok secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau oleh daya beli rakyat. Kebijakan penyediaan pangan bertumpu pada produksi dalam wilayah tersebut sejauh kondisi obyektif memungkinkan. Untuk mencukupi kebutuhan pangan dari produksi ditempuh berbagai kebijakan dan langkah untuk meningkatkan produksi pangan. Kebijakan tersebut berupa penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan input produksi, kebijakan yang berkaitan dengan budidaya tanaman, pemasaran dan stabilitas harga.

Hal terpenting mengenai kebijakan khusus yang sangat mendesak dan perlu diperhatikan saat ini adalah mempertahankan kebijakan stabilitas harga secara konsisten dan kontinyu agar dapat menjamin keseimbangan antara permintaan dan penawaran antara petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen. Kebijakan sebagai komponen penting dalam sistem ketahanan pangan berintikan pada 4 (empat) aspek, yaitu :

1. Adanya kebijakan makro yang mendukung produksi pangan yang berkait dengan program pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja dan pemerataan.
2. Tersedianya peluang peningkatan produksi yang mampu mendukung peningkatan konsumsi yang berlangsung secara terus menerus sebagai hasil peningkatan pendapatan atau pun pertambahan jumlah penduduk.
3. Menjamin iklim investasi yang sehat dan mematikan inisiatif pasar.
4. Adanya sistem ketahanan pangan pada skala rumah tangga untuk meningkatkan gizi dan mengentaskan orang-orang miskin

Khusus untuk wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara riil merupakan daerah yang memiliki surplus terhadap ketersediaan pangan di tingkat nasional, untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam kebijakan pertanian sangatlah diperlukan. Dalam artian kebijakan untuk mengatasi masalah pangan tidak hanya dengan meningkatkan produksi sehingga dapat mengurangi ketergantungan dari wilayah lain atau negara lain tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang pasar yang timbul di era pasar bebas ini.

Selain tersebut di atas kekuatan otonomi daerah harus mengacu kepada kekuatan pasar produk-produk pertanian yang dikombinasikan dengan kekuatan pemerintah daerah dengan memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat serta tidak meninggalkan partisipasi demokrasi. Dengan mengkombinasikan keempat hal tersebut diharapkan pembangunan pertanian akan dapat bersaing secara kompetitif dalam era globalisasi. Kondisi tersebut tidak akan berjalan apabila ada dukungan dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, dinas pertanian dan lembaga yang terkait. Dimana perguruan tinggi akan bekerja sama dengan dunia usaha, masyarakat lokal dan masyarakat supra lokal.

IMPLIKASI SUMBERDAYA, STRATEGI KETAHANAN PANGAN DALAM MENYONGSONG OTONOMI DAERAH DAN ERA GLOBALISASI

Dalam menyongsong era otonomi daerah di Indonesia, pemikiran pembangunan pertanian agaknya memang perlu segera berbenah diri. Pemberian otonomi kepada daerah menyebabkan pergeseran dalam porsi kewenangan dan hubungan pusat dan daerah. Implikasinya adalah pembangunan sektoral yang sebelumnya kewenangannya merupakan dominasi pemerintah pusat telah akan bergeser menjadi lebih banyak kewenangan daerah.

Pergeseran ini otomatis akan menyebabkan pergeseran dan dampak terhadap aspek efisiensi maupun aspek pemerataan. Perkiraan tentang dampak pemberian otonomi lebih luas dan desentralisasi merupakan tantangan intelektual yang menarik untuk dihadapi.

Otonomi daerah yang belum dipersiapkan akan menjadikan kebijakan pangan nasional semakin rapuh karena : (1). kurangnya koordinasi yang baik antar tingkat kabupaten dalam manajemen sumberdaya alam seperti sistem irigasi dan alokasi sumberdaya air, (2) Keterbatasan tenaga ahli di daerah dalam bidang pangan, (3) Belum tersedianya jalan penghubung dari satu wilayah lain. Jika otonomi ini diberlakukan, maka masing-masing wilayah akan memikirkan sendiri kepentingan pembangunan infrastrukturnya, dan (4) munculnya egosektoral dimana daerah yang satu enggan membantu daerah lainnya. Bagi daerah yang kekurangan sumberdaya alam akan sangat

berpengaruh terhadap kebijakan ketahanan pangan daerah. Daerah ini akan memerlukan sumber dana yang cukup besar untuk memberikan insentif kepada para petaninya untuk terus menanam padinya.

Biaya dan resiko ketahanan pangan akan menjadi sangat murah apabila ditanggung renteng secara bersama-sama. Beberapa hal yang perlu dikerjakan guna mempertahankan ketahanan pangan dalam implikasinya pelaksanaan otonomi daerah mendatang adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya penjabaran yang jelas dalam mengimplementasikan UU nomer 22 dan nomer 25 tahun 1999
2. Tanggungjawab kebijakan ketahanan pangan sebaiknya diberikan kepada pemerintah pusat atas masukan daerah guna mengharmoniskan ketahanan pangan nasional dan regional. Instrumen kebijakan baru seperti matching grant dapat digunakan sebagai pelaksanaan ketahanan pangan nasional yang dalam pelaksanaannya sebagai insentif bagi daerah yang memerlukannya.

Di masa mendatang ketahanan pangan nasional hendaknya menjadi perhatian utama dalam penentuan kebijakan pertanian. Ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, akan tetapi juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Strategi yang perlu dilakukan dalam kebijakan pangan, antara lain adalah :

1. Perlu segera direalisasikan kelembagaan pangan di tingkat daerah, semacam Pasar Induk Beras, yang diharapkan menjadi transaksi antara permintaan dan penawaran serta menjaga keseimbangan harga pangan
2. Diperlukan koordinasi penelitian dan pengembangan baik kalangan pemerintah maupun swasta yang bersifat independen untuk melaksanakan kajian secara kontinyu bagi pengembangan pangan di tingkat wilayah maupun nasional. Dalam hal ini perlu disediakan insentif khusus bagi peneliti-peneliti atas temuannya.
3. Perlunya dibentuk semacam Pusat Informasi Bisnis bagi kegiatan pangan. Hal ini dimaksudkan agar terjaganya keseimbangan pasar, serta terjalannya jaringan kerjasama usaha masing-masing wilayah.
4. Diperlukan kemandirian lokal dalam pengambilan keputusan di bidang penyediaan pangan yang bersifat interkoneksi dan implementaris. Wujud pembangunan pertanian seperti ini tidak akan terpuruk atau berdaya menghadapi persaingan global, karena dengan tatanan yang kuat ia dapat menghindari tekanan atau dominasi liberalisasi perdagangan.

ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

Memperhatikan beberapa hal yang telah diuraikan terlebih dahulu, maka struktur agribisnis saat ini belum dapat memberdayakan ekonomi petani untuk mencapai daya saing agribisnis. Oleh karena itu, strategi dasar pengembangan agribisnis mendatang adalah mengubah struktur agribisnis yang ada menjadi struktur agribisnis integrasi vertikal dan horizontal (*resource base* dan nilai tambah).

Strategi agribisnis integrasi vertikal dapat dikembangkan ke dalam beberapa pola:

Pertama, agribisnis integrasi vertikal dengan pola koperasi agribisnis. Dengan pola ini petani, peternak, nelayan, didorong untuk mengembangkan koperasi agribisnis yang dikelola secara profesional. Kegiatan usaha koperasi agribisnis ini bukan pada usahatani, tetapi pada sub-sistem agribisnis hulu dan hilir. Dengan demikian, nilai tambah yang ada pada sub-sistem agribisnis hulu dan hilir dapat diambil petani melalui koperasi. Menurut **Hammel dan Prahalad, 1994, Kabul Santoso, 1997**, untuk memperkuat keberadaan koperasi yang dapat berintegrasi vertikal berdasarkan orientasi agribisnis dalam suatu kekuatan usaha diperlukan struktur usaha yang “benar”, yaitu memiliki bisnis inti (*core business*) beserta fasilitas-fasilitasnya dalam (*core business facilities*) yang tepat. Pemilihan bisnis yang tepat dapat diartikan sudah mencerminkan kekuatan (*strengths*) yang dimiliki dan prospek masa depan (*opportunities*), serta sudah sedemikian rupa mempertimbangkan berbagai faktor kunci keberhasilan (*key succes factors*) yang sudah ada dan hal ini dapat dilakukan dengan analisis SWOT. Pola koperasi ini sudah dikembangkan yaitu pola koperasi agribisnis susu yang tergabung dalam gabungan Koperasi Susu Indonesia.

Kedua, agribisnis integrasi vertikal dengan pola perusahaan kemitraan agribisnis (pemilikan saham bersama atau usaha patungan) yang menguntungkan semua pihak (*win - win alliance*). Pada pola ini pengusaha agribisnis hulu, petani usahatani dan pengusaha agribisnis hilir yang berada di luar jalur produksi yang selama ini terpisah membentuk perusahaan agribisnis vertikal milik bersama dan

dikelola secara profesional. Pembagian keuntungan didasarkan pada proporsi kepemilikan saham.

Ketiga, agribisnis integrasi vertikal dengan pola kepemilikan tunggal atau kelompok, bentuk ini sudah ada di Indonesia, seperti kelapa sawit. Diharapkan pola ini menjadi pelopor dalam merebut pola pasar internasional. Apabila agribisnis integrasi vertikal tersebut dapat diwujudkan, masalah transmisi dan margin ganda tersebut akan hilang, sehingga agribisnis di Indonesia akan berciri: mampu memenuhi dan menyesuaikan atribut produk agribisnis dengan preferensi konsumen yang berkembang, mampu melakukan inovasi mandiri melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan atas kemampuan sendiri, mampu mengantisipasi, menyerap dan menyesuaikan diri terhadap pertumbuhan ekonomi dan mampu menghadapi persaingan ketat di pasar internasional (Simatupang, 1995). Dengan kata lain, struktur agribisnis integrasi vertikal membawa agribisnis nasional mampu menghadapi dua tantangan, yaitu : mampu meningkatkan daya saing dan mampu mengakomodasi kepentingan ekonomi domestik. Namun demikian untuk memperkuat semua sub-sistem agribisnis diperlukan perencanaan wilayah komoditas di masing-masing wilayah agar keberadaan komoditas tertentu dapat mengakses pada kebutuhan sektor hilirnya/industri.

Strategi horizontal pola pengembangan sentra produksi dari suatu komoditas unggulan dapat dipandang sebagai suatu respon terhadap tanda-tanda perkembangan perdagangan baik di pasar nasional maupun internasional. Sasaran usaha menciptakan sentra produksi suatu komoditas unggulan tidak hanya terbatas pada tercapainya peningkatan pendapatan petani yang mengusahakan komoditas unggulan tersebut, tetapi juga tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional yang hasilnya secara merata dinikmati oleh masyarakat.

Memperhatikan sasaran tersebut di atas, penentuan sentra produksi suatu komoditas unggulan harus memperhatikan faktor *endowment* atau *resource base* (kesesuaian lahan/agro-klimat, ketersediaan tenaga kerja dan modal), pasar dan harga, keterkaitan ke belakang mau pun ke depan dengan industri lain, tingkat

kesiapan prasarana, perencanaan wilayah, dimana sentra produksi tersebut berada, skala usaha/ekonomi, tingkat penguasaan teknologi dan sistem manajemen, aspek lingkungan serta aspek kemitraan.

Sebagai misal, konsep dasar Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan (SPAKU) harus memperhatikan prinsip keterpaduan yang mencakup keterpaduan antar program, sektor, sub-sektor, wilayah/lokasi, antara pusat dan daerah, antar komoditi, antar sub-sistem dalam sistem agribisnis. Pendekatan keterpaduan mengandung arti bahwa pengembangan masing-masing sub-sistem agribisnis satu dengan lainnya saling mendukung dan saling tergantung akan menentukan keberhasilan pembangunan agribisnis. Hal ini berarti perkembangan salah satu sub-sistem akan mempengaruhi perkembangan sub-sistem yang lain.

Pengembangan SPAKU ini merupakan kegiatan untuk memacu pembangunan ekonomi wilayah. Secara bertahap, kegiatan produksi pertanian mendorong berkembangnya kegiatan agribisnis, seperti bisnis input (sarana produksi dan alat mesin), bisnis pengolahan atau agroindustri dan bisnis pemasaran hasil pertanian. SPAKU memerlukan dukungan aspek teknis yang menyangkut kesesuaian lahan, aspek agroekonomis dan dukungan iklim. Kesesuaian teknis tersebut harus teruji dengan aspek lainnya. Selain itu, SPAKU akan terjadi kalau komoditas unggulan mempunyai pasar, baik pasar lokal maupun pasar nasional. Pasar agribisnis akan berkembang akibat adanya permintaan komoditas tersebut, baik yang datang dari konsumsi langsung rumah tangga maupun permintaan dari industri terkait yang menjadikan produk komoditas unggulan tersebut sebagai bahan baku (industri pengolahan atau agroindustri).

SPAKU yang terjadi perlu didukung oleh ketersediaan input yang diperlukan, hal ini dimaksudkan agar perkembangan SPAKU terjadi secara berkesinambungan dengan suplai input yang harus dipasok oleh industri input. Selain itu SPAKU juga perlu didukung oleh sistem transportasi yang memungkinkan arus barang (produk dan input) dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian ketersediaan barang dapat tepat waktu, tepat jumlah dan tepat tempat serta tidak mengurangi kualitas. Melihat pengembangan agribisnis

tersebut baik secara vertikal maupun horizontal, maka sasaran program agribisnis di Jawa Timur antara lain :

1. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan produksi pertanian yang dapat di pasarkan sebagai bahan baku industri maupun ekspor
2. Meningkatkan volume dan penerimaan ekspor
3. Meningkatkan kesempatan kerja produktif di pedesaan pada on-farm dan off-farm yang memberikan nilai imbalan yang layak
4. Berkembangnya berbagai kegiatan usaha berbasis pertanian dengan wawasan agribisnis yang mampu memberikan keuntungan yang wajar
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan agribisnis dan memajukan perekonomian di pedesaan
6. Terpeliharanya produktivitas sumberdaya alam, berkembangnya usaha pertanian konservasi dan terjaganya kualitas lingkungan hidup.

PENUTUP

Disadari sepenuhnya bahwa pembangunan pertanian melibatkan bukan hanya pemerintah tetapi seluruh masyarakat pertanian dan stakeholders lainnya. Oleh karena itu visi dan misi harus dirumuskan lebih dahulu sebelum dijadikan pegangan dan petunjuk jalan ke arah mana pembangunan pertanian harus dilakukan. Mengingat pembangunan pertanian sangat erat hubungannya dengan sumberdaya alam, oleh karena itu pembangunan pertanian di Jawa Timur sejogjanya didasarkan pada prinsip pembangunan pertanian agribisnis berkelanjutan.

Lebih lanjut apabila dikaitkan dengan otonomi daerah strategi yang ditempuh dalam menghadapi era global diprioritaskan pada penetapan swasembada pangan bernuansa agribisnis khususnya beras harus sejalan dengan sasaran prioritas strategis di masa mendatang. Dalam kaitan ini, upaya-upaya untuk memberdayakan sumber daya manusia petani harus memperoleh perhatian yang sebaik-baiknya, melalui kebijakan-kebijakan yang dirumuskan secara tepat. Oleh sebab itu food security dan food safety merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kelanjutan pembangunan dan ketahanan bangsa.

KEPUSTAKAAN

- Baharsjah, Syarifuddin, 1997, Pidato Pengarahan Untuk Pertanian Pada Pembukaan Simposium Nasional Agribisnis, Jakarta.
- G., Hammel and C.K Prahalad, 1994, *Competing For The Future*, Harvard Bussiness Scholl Press, USA.
- Hartoyo, Sri, 1997, Pemantapan Konsep Dasar Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan (SPAKU), Lembaga Penelitian IPB, Bogor.
- H.S. Dillon, 2000, Ketahanan Pangan dalam Otonomi Daerah, Seminar Koperasi XXII dan Kongres XXI, Perheppi, Jakarta.
- Rudi, A Gany, 2000, Pembangunan Pertanian dalam Era Otonomi Daerah dan Liberalisasi Perdagangan, Makalah Seminar Koperasi XXII dan Kongres XXI, Perheppi, Jakarta.
- Santoso, Kabul, 1996, Pasar dan Perdagangan Bebas Dalam Konteks Ekonomi Pancasila Taskap, Kursus Singkat VI, Lemhanas, Tidak dipublikasikan, Jember.
- _____, 1997, Laporan Penelitian Action Research Pengembangan KUD Mandiri Inti Berdasarkan Sentra Pengembangan Agribisnis, Universitas Jember, Jember.
- _____, 1997, Wawasan dan Strategi Pembangunan Pertanian/Perkebunan Wilayah Propinsi Jawa Timur yang Berorientasi Agribisnis, Ceramah Prospek Agribisnis dan Molekuler, Jember.
- Santoso dan Soetriono, 1998, Tantangan dan Peluang Pengembangan Agribisnis dan Industri, Makalah Workshop Desain dan Inkubator Agribisnis, Universitas Jember, Jember.
- Saragih, Bungaran, 1995, Pengembangan Agribisnis Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Menghadapi Abad 21, Ceramah Ilmiah di Universitas Jember tanggal 30 September 1996, Jember.
- Soetriono, 1998, Konsep dan Strategi Pengembangan Bimas Berwawasan Agribisnis Jawa Timur, Makalah Seminar Regional, Malang.
- Simatupang, P., 1997, Pengembangan Agroindustri Sebagai Penggerak Pembangunan Desa, Pusat Agroekonomika Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor.

DAFTAR HADIR

No	Nama	Instansi
1.	A. Latief Abadi	FP. Unibraw
2.	Achmadi	KTNA Lamongan
3.	Agus Sugiyatno	IPPTP Tlekung
4.	Agus Suryadi	BPTP Karangploso
5.	Anang Triwiratno	IPPTP Tlekung
6.	Arry Supriyanto	IPPTP Tlekung
7.	Balitbangda Jatim	Balitbangda Tk. Prop. Jatim
8.	Bambang Pamudji	IPPTP Wonocolo
9.	Bambang Siswanto	IPPTP Wonocolo
10.	Bangun Nusantoro	BPTP Karangploso
11.	Bappeda	Bappeda Tk. I Prop. Jatim
12.	Baswarsiati	BPTP Karangploso
13.	Budi Santosa	BPTP Karangploso
14.	Damat	FP Unmuh Malang
15.	Didik Budi Wijono	IPPTP Grati
16.	Didik Sulistyanto	Lemlit Univ. Jember
17.	Dini Hardini	BPTP Karangploso
18.	Diperta Pangan Daerah	Diperta Pangan Daerah Tk. I Jatim
19.	Djoma'ijah	IPPTP Tlekung
20.	Dwi Setyorini	BPTP Karangploso
21.	Eddy Purnomo	IPPT Wonocolo
22.	Effendi Pasandaran	P4 Badan Litbang Pertanian
23.	Endah Retnaningtyas	BPTP Karangploso
24.	F. Kasijadi	BPTP Karangploso
25.	Forita Dyah Arianti	BPTP Ungaran
26.	Gatot Subiyanto	BIPP Lamongan
27.	Gunawan Sukarso	P3GI Pasuruan
28.	Hendarto	Kanwil BRI
29.	Hendri Arianto	IPPTP Tlekung
30.	Heru Sudarsono	BPTP Karangploso
31.	Hesti R. Wijaya	Yayasan Pengembangan Pedesaan (LSM)
32.	Hidayat Nataatmadja	PSE Bogor

- | | | |
|-----|----------------------|-------------------------------------|
| 33. | HM. Kadir Rasyidi | KTNA Tk. I Jatim |
| 34. | I Made Rai Yasa | IPPTP Denpasar |
| 35. | I.G.A.K. Sudarmaja | IPPTP Denpasar |
| 36. | Iffah Irsjadina | BPTP Karangploso |
| 37. | Kabul Santoso | Universitas Jember |
| 38. | Karimah | BAPPEDA Tk. I Jatim |
| 39. | Kusdiarianto | Diperta Tk. I Jatim |
| 40. | Luki Rosmahani | BPTP Karangploso |
| 41. | Lukman Affandy | IPPTP Grati |
| 42. | M. Ali Yusran | IPPTP Wonocolo |
| 43. | M. Cholil Mahfud | BPTP Karangploso |
| 44. | M. Soleh | BPTP Karangploso |
| 45. | Mochtar Effendy | BIPP Jombang |
| 46. | Muchari | BPTP Lembang |
| 47. | Mutia Erti Devi | IPPTP Tlekung |
| 48. | Nunuk Sunu SW | BLPP Ketindan |
| 49. | Nurul Istiqomah | BPTP Karangploso |
| 50. | Padang Bambang W | Dinas Peternakan Daerah Tk. I Jatim |
| 51. | Pudji Santosa | BPTP Karangploso |
| 52. | Pudjiyanto | Puslit Kopi & Kakao |
| 53. | Pudyantono | Diperta Lamongan |
| 54. | Rina EW | BPTP Karangploso |
| 55. | Roesmiyanto | BPTP Karangploso |
| 56. | Ruly Hardianto | BPTP Karangploso |
| 57. | Sarjana | BPTP Ungaran |
| 58. | Sarwiyono | Faperta Unibraw |
| 59. | Sentot R. Soemarsono | BPTP Karangploso |
| 60. | Siti Hartanti | FP. Univ. Jember |
| 61. | Sjaiful Chanafi | BPTP Karangploso |
| 62. | Soehartono | Diskan Tk. I Jatim |
| 63. | Sri Hartiningsih | BLPP Batu |
| 64. | Sri Prapti | Kanwil Pertanian |
| 65. | Sri Yuniastuti | BPTP Karangploso |
| 66. | Suhardjo | BPTP Karangploso |
| 67. | Suhartono | Dinas Perikanan Daerah Tk. I Jatim |
| 68. | Sukarno Roesmarkam | BPTP Karangploso |

- | | | |
|-----|---------------|------------------|
| 69. | Supangat | BPTP Karangploso |
| 70. | Suprpto | Diperta Jombang |
| 71. | Sutanto JT | IPPTP Wonocolo |
| 72. | Suwandi | IPPTP Wonocolo |
| 73. | Suwarso | Balittas Malang |
| 74. | Suwono | BPTP Karangploso |
| 75. | Suyanto H | BPTP Karangploso |
| 76. | Uum Umiyasih | IPPTP Grati |
| 77. | Wiadnya DGR | Faperta Unibraw |
| 78. | Wigati Istuti | IPPTP Wonocolo |
| 79. | Yoga Ekawati | IPPTP Wonocolo |
| 80. | Yudha Sukardi | IPPTP Wonocolo |